



POHON KINERJA • DAN • CROSSCUTTING

DINAS KOPERASI DAN UKM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN 2025 - 2029

POHON KINERJA & CROSSCUTTING

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROV SUMSEL

TAHUN 2025-2029

Pohon Kinerja merupakan instrumen analitis yang digunakan untuk mengawal struktur logika sebab-akibat dalam menjabarkan kondisi-kondisi yang diperlukan organisasi untuk mencapai hasil (*outcome*) yang diinginkan. Alat bantu ini mengadopsi model logis untuk memetakan rute pencapaian kinerja secara berjenjang, mulai dari tingkat strategis, taktis, hingga operasional.

Dalam penyusunan pohon kinerja tersebut, diidentifikasi pula aspek **crosscutting**, yaitu kolaborasi lintas sektor yang menggambarkan irisan program dan kontribusi kinerja antarunit kerja maupun instansi eksternal yang saling terkait dalam pencapaian tujuan organisasi. Penerapan kedua konsep ini secara terintegrasi bertujuan untuk mendorong perencanaan yang kolaboratif, holistik, dan berorientasi pada hasil, guna memastikan penggunaan sumber daya negara dilakukan secara efektif, efisien, dan akuntabel demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1. LANDASAN STRATEGIS DAN VISI-MISI

Pohon Kinerja Dinas Koperasi dibangun di atas visi "**Sumsel Maju Terus Untuk Semua**". Secara spesifik, instansi ini mendukung dua misi utama: **Misi ke-2** mengenai ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan ekonomi kerakyatan, serta **Misi ke-5** tentang perluasan kesempatan berusaha dan lapangan kerja guna menurunkan angka kemiskinan. Pencapaian ini dijabarkan melalui tujuan RPJMD untuk meningkatkan daya saing, ketahanan ekonomi, dan kesejahteraan sosial masyarakat.

2. STRUKTUR POHON KINERJA (SASARAN STRATEGIS)

Dalam dokumen perencanaan tersebut, kontribusi Dinas Koperasi diukur melalui empat **Sasaran Strategis** utama yang menjadi pilar pohon kinerja:

- **Meningkatnya tata kelola dan daya saing koperasi:** Fokus pada penguatan kelembagaan agar koperasi menjadi legal dan berkualitas.
- **Menguatnya ekosistem kewirausahaan daerah:** Mendorong tumbuhnya wirausaha baru dan pendampingan UMKM secara kelembagaan.
- **Meningkatnya skala dan kualitas usaha UMKM secara berkelanjutan:** Fokus pada peningkatan akses pasar, mutu produk, dan transformasi UMKM dari informal ke formal.
- **Praktik tata kelola pemerintahan yang akuntabel:** Memastikan dukungan administrasi dan manajemen internal organisasi berjalan prima.

Setiap sasaran strategis ini kemudian diturunkan (*cascading*) ke tingkat operasional, mulai dari fasilitasi perizinan, pemeriksaan kesehatan koperasi, hingga inkubasi wirausaha pemula.

3. ANALISIS CROSSCUTTING: KOLABORASI LINTAS SEKTOR

Pencapaian target-target di atas tidak dapat dilakukan secara sektoral oleh Dinas Koperasi saja, melainkan membutuhkan **Crosscutting** atau kolaborasi lintas perangkat daerah dan instansi vertikal. Dua program unggulan yang menggambarkan sinergi ini adalah:

A. Program Strategis Nasional (PSN) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Program ini bertujuan meningkatkan volume usaha koperasi yang berkontribusi pada investasi daerah. Aktor crosscutting yang terlibat meliputi:

- **Regulator: Kementerian Koperasi RI** berperan menetapkan kebijakan nasional, sementara **Kanwil Kemenkumham** memfasilitasi legalitas badan hukum koperasi. **Bappeda** bertugas mengintegrasikan program ini ke dalam perencanaan pembangunan daerah yang lebih luas.
- **Fasilitator: Dinas Koperasi dan UKM** bertindak sebagai pemimpin koordinasi dan pembinaan. Di tingkat tapak, **Dinas PMD** dan **Pemerintah Desa/Kelurahan** memfasilitasi pembentukan koperasi melalui musyawarah desa, didukung oleh **Pendamping Koperasi** yang menguatkan kelembagaan dan usaha.
- **Pengembang Usaha:** Berbagai dinas teknis seperti **Dinas Pertanian, Perikanan, Peternakan, dan Perindustrian** berperan mengembangkan basis komoditas, inovasi, dan nilai tambah produk koperasi. **Dinas Perdagangan** memperluas akses pasar, sementara **Perguruan Tinggi** memberikan penguatan kapasitas SDM.
- **Pembiayaan & Kemitraan: Bank Indonesia** dan **OJK** fokus pada literasi dan inklusi keuangan. **Perbankan** menyediakan akses pembiayaan, sedangkan **BULOG** serta **BUMN/BUMD** berperan sebagai mitra pemasaran dan penjamin pasar (*offtaker*).
- **Pengawasan & Dukungan Teknis: Inspektorat/APIP** memastikan akuntabilitas pelaksanaan program. **Dinas PUPR** memberikan verifikasi teknis untuk pembangunan fisik gerai KDKMP, **Diskominfo** mendukung digitalisasi, dan **BPKAD** memastikan optimalisasi aset daerah.

Keberhasilan kolaborasi lintas sektor ini diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB. Hal ini menunjukkan bahwa PSN KDKMP bukan sekadar program internal Dinas Koperasi, melainkan agenda bersama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Kementerian/Lembaga, hingga dunia usaha untuk menggerakkan roda ekonomi dari tingkat desa.

Dengan struktur Leading Sector yang berada pada Dinas Koperasi dan UKM, seluruh aktor pendukung bergerak dalam satu harmoni untuk memastikan koperasi desa menjadi entitas bisnis yang berkualitas, legal, dan berdaya saing tinggi

B. Program Sultan Muda (Wirausaha Muda)

Program Sultan Muda merupakan program prioritas yang diturunkan dari visi "**Sumsel Maju Terus Untuk Semua**" dan **Misi ke-5** yang berfokus pada perluasan kesempatan berusaha serta lapangan kerja untuk menurunkan angka kemiskinan. Secara teknis, program ini mendukung sasaran RPJMD untuk meningkatkan kesempatan kerja dan sasaran Renstra untuk menguatkan ekosistem kewirausahaan daerah dengan indikator utama berupa **Pertumbuhan Wirausaha**.

Program ini difokuskan pada penciptaan wirausaha muda yang mandiri dan inovatif. Sinergi dilakukan dengan:

1. Aktor Akademisi dan Pendampingan Teknis

- Perguruan Tinggi: Berperan dalam menyediakan program inkubasi bisnis bagi mahasiswa atau alumni, memberikan pendampingan berkelanjutan, serta melakukan riset dan inovasi yang dapat diterapkan dalam dunia usaha.
- Inkubator Bisnis: Bertugas memberikan *coaching* dan *mentoring* intensif, membuka akses ke jaringan bisnis profesional, serta memfasilitasi program akselerasi bagi usaha yang sedang berkembang.

2. Aktor Perangkat Daerah (Sektor Publik)

- DISPORA (Dinas Pemuda dan Olahraga): Fokus pada tugas pembinaan serta pengembangan potensi kewirausahaan khusus di kalangan pemuda melalui berbagai pelatihan kepemimpinan dan manajemen usaha.
- DISPERINDAG (Dinas Perindustrian dan Perdagangan): Berperan dalam promosi produk-produk hasil wirausaha muda, memfasilitasi keikutsertaan dalam pameran, dan membuka akses pasar yang lebih luas.
- DPMPSTP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu): Memberikan dukungan penuh dalam fasilitasi perizinan berusaha dan pemenuhan legalitas usaha, seperti penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara cepat dan mudah.
- DISKOMINFO (Dinas Komunikasi dan Informatika): Mendukung digitalisasi usaha melalui pelatihan penggunaan teknologi informasi, penguatan literasi digital bagi pelaku usaha, serta penyediaan platform promosi daring (*online*).

3. Aktor Otoritas Keuangan dan Perbankan

- Bank Indonesia (BI): Berperan dalam meningkatkan literasi keuangan pelaku usaha, mendorong digitalisasi transaksi (seperti penggunaan QRIS), serta melakukan pengembangan ekosistem UMKM secara menyeluruh.
- OJK (Otoritas Jasa Keuangan): Bertugas memastikan literasi dan inklusi keuangan bagi wirausaha muda berjalan dengan baik, serta memberikan perlindungan bagi konsumen jasa keuangan.
- Perbankan: Peran utamanya adalah sebagai penyedia akses permodalan melalui berbagai produk keuangan dan skema pembiayaan yang ramah bagi wirausaha muda.

4. Aktor Dunia Usaha dan Mitra Strategis

- Dunia Usaha: Berperan dalam membangun kemitraan strategis, membuka akses pasar bagi produk lokal, serta melakukan transfer pengetahuan (*knowledge transfer*) kepada wirausaha baru.
- BUMN / BUMD: Berkontribusi melalui pelaksanaan program kemitraan, penyaluran dana CSR (*Corporate Social Responsibility*), serta memberikan dukungan nyata dalam pengembangan usaha di daerah.

Seluruh aktor ini bekerja secara kolaboratif dalam satu ekosistem untuk mencapai Outcome Program, yaitu bertambahnya wirausaha baru, kenaikan kelas usaha, serta kemudahan akses pembiayaan dan pasar, yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui tumbuhnya wirausaha yang produktif.

4. KESIMPULAN

Integrasi antara Pohon Kinerja yang logis dengan pemetaan Crosscutting bertujuan untuk menghilangkan ego sektoral (*silo planning*). Dengan narasinya yang terstruktur, setiap unit kerja memahami bahwa keberhasilan indikator makro, seperti **Rasio Kewirausahaan** atau **Pertumbuhan PDRB sektor Koperasi**, sangat bergantung pada dukungan infrastruktur, kemudahan izin, ketersediaan modal, dan inovasi yang dikawal bersama oleh berbagai aktor dalam ekosistem pemerintahan.

PONDI KIRIJA 2025-2030
DINAS KOPERASI & UKM PROV. SUMSEL
VISI
MISI
TUJUAN RPJMD

SUKSES MAJU TERUS UNTUK SEMUA
(1) Meningkatkan standar ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi lapangan yang berkualitas untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat
(2) Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjamin untuk memunculkan energi kebangkitan
(3) Meningkatkan daya saing dan ketahanan ekonomi daerah
(4) Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat





POHON KINERJA CROSSCUTTING PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (PSN) KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI SUMATERA SELATAN

PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

VISI RPJMD
"SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA"

MISI RPJMD
"Membangun ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing melalui penguatan sektor unggulan daerah serta pemberdayaan ekonomi masyarakat."

TUJUAN RPJMD
"Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah"

SASARAN RPJMD
"Meningkatnya Investasi dan Perdagangan Daerah"

TUJUAN RENSTRA
"Meningkatnya kontribusi Koperasi dan UMKM dalam perekonomian"

SASARAN RENSTRA (1)
Meningkatnya tata kelola dan daya saing koperasi
INDIKATOR KINERJA
Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi

SASARAN RENSTRA (2)
Menguatnya ekosistem kewirausahaan daerah

SASARAN RENSTRA (3)
Meningkatnya skala dan kualitas usaha UMKM secara berkelanjutan

1
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi melalui kelembagaan yang berkualitas dan legal.

2
Meningkatnya produktivitas koperasi.

3
Peningkatan iklim usaha koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi koperasi.

4
Meningkatkan partisipasi dan kapasitas SDM koperasi dalam berkoperasi secara produktif dan berkelanjutan.

KOP DES MERAH PUTIH
**PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (PSN)
KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH**

OUTCOME
Meningkatnya volume usaha koperasi yang berkontribusi terhadap peningkatan investasi dan perdagangan daerah.

AKTOR CROSSCUTTING DAN PERAN

1. REGULATOR

- Kementerian Koperasi RI : Menetapkan kebijakan nasional serta pembinaan Program KDKMP.
- Kanwil Kementerian Hukum : Memfasilitasi penerbitan badan hukum koperasi.
- Bappeda : Mengintegrasikan Program KDKMP dalam perencanaan pembangunan daerah.

2. FASILITATOR

- Dinas Koperasi dan UKM : Memimpin koordinasi, pembinaan, pendampingan, dan pengawasan Program KDKMP.
- Dinas PMD : Memfasilitasi pembentukan koperasi melalui Musyawarah Desa Khusus.
- Pemerintah Desa/Kelurahan : Membentuk dan mengembangkan koperasi sesuai potensi desa.
- NPAK : Menyusun akta pendirian koperasi.
- Pendamping Koperasi : Mendampingi penguatan kelembagaan dan usaha koperasi.

3. PENGEMBANG USAHA

- Dinas Pertanian : Mengembangkan koperasi berbasis komoditas pertanian.
- Dinas Perikanan : Mendukung koperasi sektor perikanan.
- Dinas Peternakan : Mengembangkan koperasi sektor peternakan.
- Dinas Perdagangan : Memperluas akses pasar koperasi.
- Dinas Perindustrian : Meningkatkan nilai tambah produk koperasi.
- Perguruan Tinggi : Memberikan inovasi dan penguatan kapasitas SDM.

4. PEMBIAYAAN & KEMITRAAN

- Bank Indonesia : Memperkuat ekosistem ekonomi dan literasi keuangan.
- OJK : Meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.
- Perbankan : Menyediakan akses pembiayaan koperasi.
- BULOG : Menjadi mitra pemasaran dan offtaker.
- BUMN/BUMD : Mengembangkan kemitraan usaha koperasi.

5. PENGAWASAN & DUKUNGAN TEKNIS

- Inspektorat/APIP : Memastikan pelaksanaan program akuntabel.
- Dinas PUPR : Menjadi tim teknis dalam proses verifikasi dan validasi hasil pembangunan gerai KDKMP.
- Diskominfo : Mendukung digitalisasi koperasi.
- BPKAD : Mendukung optimalisasi pemanfaatan aset daerah.



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB

LEADING SECTOR

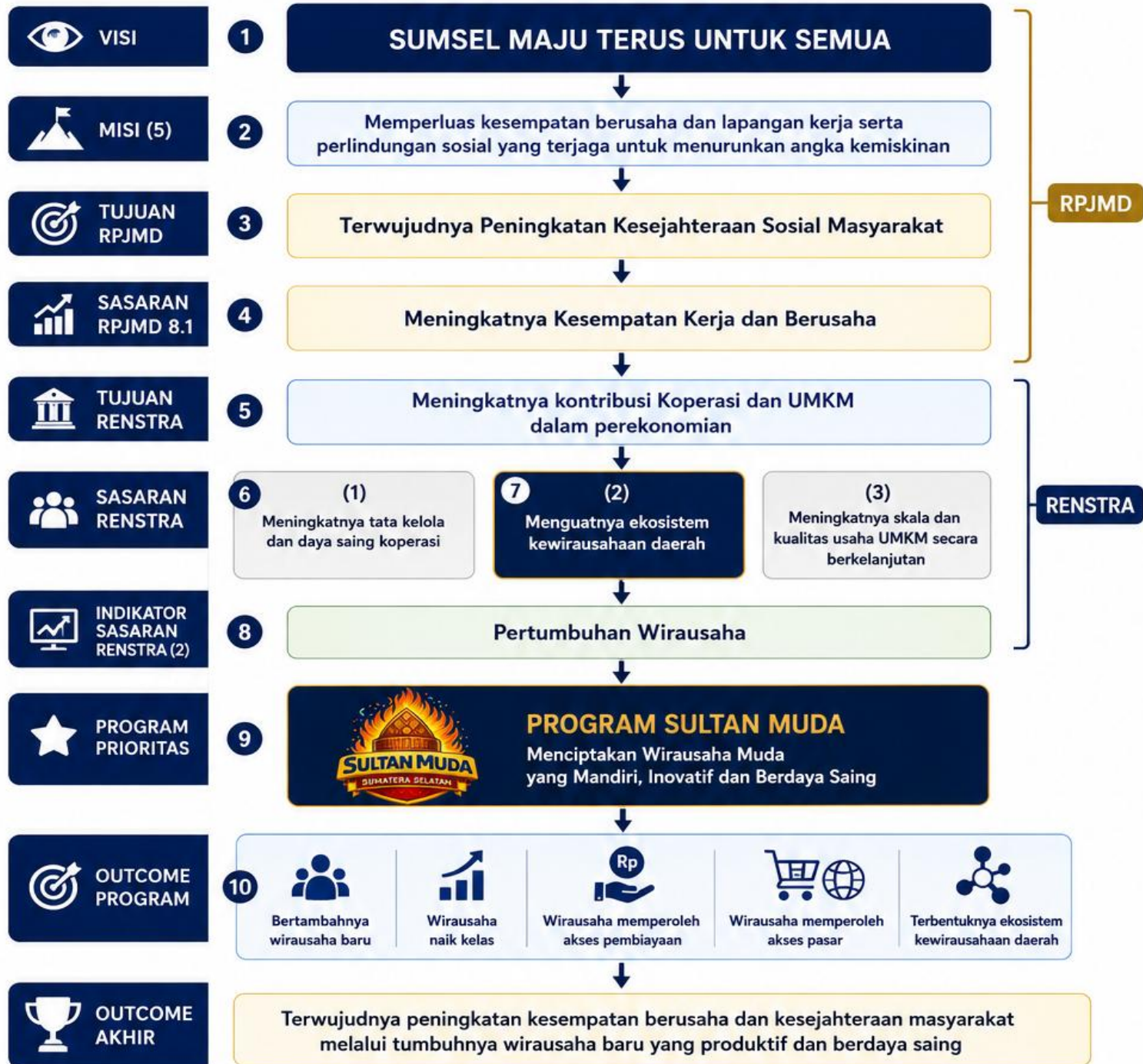
: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan

CROSSCUTTING

: Pemerintah Daerah • Pemerintah Desa • Kementerian/Lembaga • Lembaga Keuangan • Dunia Usaha • Perguruan Tinggi • BUMN/BUMD

POHON KINERJA CROSSCUTTING PROGRAM SULTAN MUDA

PROVINSI SUMATERA SELATAN



AKTOR CROSSCUTTING DAN PERAN

PERGURUAN TINGGI Inkubasi bisnis, pendampingan, riset dan inovasi	DISPORA Pembinaan dan pengembangan kewirausahaan pemuda	DISPERINDAG Promosi produk, fasilitasi pameran, dan akses pasar	DPMPSTP Fasilitasi perizinan berusaha dan legalitas (NIB)	DISKOMINFO Digitalisasi usaha, penguatan literasi digital dan promosi online	BI BANK INDONESIA Literasi keuangan, digitalisasi transaksi, dan pengembangan ekosistem UMKM
OJK Literasi dan inklusi keuangan, serta perlindungan konsumen	PERBANKAN Penyediaan akses pembiayaan dan produk keuangan bagi wirausaha	DUNIA USAHA Kemitraan, akses pasar, dan transfer pengetahuan	BUMN / BUMD Program kemitraan, CSR, dan dukungan pengembangan usaha	INKUBATOR BISNIS Coaching, mentoring, akses jaringan, dan akselerasi usaha	

Keterangan: Program Sultan Muda merupakan program prioritas pada Sasaran Renstra (2) yang dilaksanakan secara kolaboratif dan melibatkan banyak pihak untuk mendorong pertumbuhan wirausaha di Sumatera Selatan.